

Menguatkan Kembali Nilai Multikulturalisme dan Persatuan Bangsa melalui Pembelajaran Sejarah

Mohamad Uly Purwasatria, M.Pd
Alumni Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah
Universitas Pendidikan Sejarah
purwasatria.ully@gmail.com

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh memanasnya kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang dimulai oleh pemberitaan ricuhnya antar pendukung sepak bola yang menimbulkan korban, kemudian panasnya kontestasi politik pemilihan umum tahun 2019 yang menyebabkan terpecahnya pendukung, banyaknya isu hoax yang beredar menyinggung SARA ini menjadi ancaman serius untuk keutuhan bangsa Indonesia saat ini. Perlunya tindakan preventif dari semua pihak agar permasalahan ini tidak memperparah bahkan sampai membubarkan NKRI. Salah satu upaya nyata adalah menguatkan kembali nilai multikulturalisme dan persatuan Bangsa mengingat komposisi masyarakat Indonesia cukup beragam suku, ras, agama dan antar golongan lainnya. Maka dalam mewujudkan usaha tersebut, pembelajaran sejarah dapat menjadi salah satu alternatif untuk menguatkan kembali nilai multikulturalisme dan persatuan bangsa. Pembelajaran sejarah berbasis multikulturalisme dapat dilakukan secara leluasa dengan landasan Kurikulum 2013 yang memuat nilai-nilai dan guru dapat merumuskan nilai multikulturalisme dan persatuan bangsa melalui beberapa materi seperti masa pergerakan nasional, dan sumpah pemuda. Selain itu, pendekatan pembelajaran melalui diskusi dengan membentuk kelompok belajar siswa dapat menguatkan nilai multikulturalisme dan persatuan bangsa.

Kata Kunci: *Nilai Multikulturalisme, Persatuan Bangsa, Pembelajaran Sejarah.*

I. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, ras/etnis, agama yang beragam. Penduduk Indonesia saat ini dianggap sebagai salah satu negara yang multikultural yang besar di dunia. Mengutip dari pendapat Yaqin (2005) jumlah pulau di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, lebih dari 200 juta jiwa penduduk dengan 300 suku dan menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam. Lebih khusus lagi, apabila dilihat dari cara pandang, tindakan dan wawasan setiap individu yang berbeda terhadap berbagai macam fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik dan terhadap hal-hal lainnya. Maka tak dapat dipungkiri mereka memiliki pandangan yang beragam. Beragamnya suku bangsa, ras, bahasa dan agama ini sudah ada sejak pada masa nenek moyang.

Kronologi

Jurnal Mahasiswa Ilmu Sejarah dan Pendidikan
ISSN 1411-1764 Vol. 1 No. 1 Tahun 2019

Keberagaman ini menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk (*plural society*). Masyarakat majemuk menurut Nasikun (2007, dalam Sapendi) memiliki dua ciri yang unik yaitu secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan *kedua* secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Kedua ciri tersebut sebenarnya sudah tergambarkan oleh prinsip *bhinneka tunggal ika* yang berarti masyarakat Indonesia yang beragam dengan perbedaan dapat terintegrasi dalam kesatuan bangsa.

Keberagaman masyarakat diatas memiliki latar belakang sejarah yang masing-masing berbeda. Perbedaan latar belakang inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi negara Indonesia terutama dalam menghadapi rawan konflik. Beberapa kasus seperti ricuhnya pendukung sepak bola yang menelan korban baru-baru ini karena salah satu penyebabnya adalah saling mengejek.

Kemudian muncul juga berita-berita hoax yang bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia terutama menghadapi kontestasi politik pemilihan umum tahun 2019. Ancaman distegrasi bangsa ini dianggap serius apabila terus dibiarkan. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang multikultural, potensi konflik akan selalu ada dan dapat membahayakan terutama konflik tersebut dapat menyebabkan terjadinya perang saudara.

Selain dialami masyarakat umum, hal ini pun masuk kedalam dunia pendidikan. Salah satu contohnya adalah berita tentang terjadinya tawuran antar siswa yang disebabkan oleh perbuatan saling ejek-mengejek. Tentunya konflik ini dilatarbelakangi oleh sebuah perbedaan. Perbedaan inilah yang menjadi sumber konflik. Sebenarnya dalam memandang sebuah perbedaan tidak harus sesama masyarakat Indonesia terlibat konflik.

Perlunya usaha-usaha preventif untuk mengatasi konflik horizontal yang disebabkan oleh adanya perbedaan ini dengan menguatkan kembali nilai multikulturalisme dan memupuk kembali persatuan bangsa seperti semboyan negara Indonesia *bhinneka tunggal ika* yang memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua, walaupun didalamnya memiliki perbedaan namun memiliki satu tujuan yang sama.

Salah satu usaha preventifnya adalah melalui pembelajaran sejarah. Alasannya adalah dalam pembelajaran sejarah terdapat materi yang dapat mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme dan persatuan bangsa yaitu melalui materi pergerakan nasional sampai

sumpah pemuda. Harapannya adalah melalui pembelajaran sejarah, dapat meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh adanya perbedaan kebudayaan.

II. Definisi Multikulturalisme, Persatuan Bangsa, dan Pembelajaran Sejarah

Multikulturalisme secara etimologis terdiri atas dua kata yaitu multi yang berarti banyak dan kultural atau kultur yang berarti budaya. Secara harfiah konsep multikultural ini dapat diartikan sebagai budaya yang banyak atau beragam (Pernantah, 2016:222). Menurut Suparlan (2002:1) Multikultural dalam konteks perspektif kebudayaan, adalah sebuah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Kemudian menurut Reed (dalam Suparlan, 2002) Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut.

Definisi multikulturalisme menurut Parekh (1997) Sebagaimana dikemukakan oleh Saifuddin (2006, hlm.139) mencakup sedikitnya tiga unsur, yaitu (1) terkait dengan kebudayaan, (2) merujuk kepada pluralitas kebudayaan, dan (3) cara tertentu untuk merespon pluralitas tersebut. Dengan demikian, maka multikulturalisme adalah cara pandang kebudayaan yang diwujudkan secara konkret dalam kehidupan yang nyata. Multikulturalisme menurut Tilaar (2004) adalah “konsep pembudayaan, dan oleh karena proses pendidikan adalah proses pembudayaan, maka masyarakat multikultural dapat diciptakan melalui proses pendidikan”.

Multikulturalisme di kalangan orang cendekiawan dianggap sebagai kebijaksanaan untuk mencapai tatanan masyarakat di mana warga yang berasal dari berlain – lain agama, suku, adat, atau kebudayaan dapat hidup bersama-sama dan membaaur dalam pergaulan sehari-hari dengan damai dan sejahtera tanpa mengorbankan ciri-ciri khasnya masing-masing. Azra menyatakan bahwa multikulturalisme adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian civility (keadaban), yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban keadaban yang demokratis (Rufaida, 2017, hlm.16-17).

Konsep multikulturalisme menurut Fay (dalam Suparlan, 2002) demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat,

Kronologi

Jurnal Mahasiswa Ilmu Sejarah dan Pendidikan
ISSN 1411-1764 Vol. 1 No. 1 Tahun 2019

sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Nilai yang termuat ke dalam multikulturalisme meliputi: toleransi, menghargai perbedaan pendapat, santun dalam berpendapat, adanya kesetaraan dan kebersamaan.

Persatuan Bangsa atau Persatuan Indonesia menurut Darmodiharjo (1991, hlm.42) persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Sementara itu, menurut Poespowardjojo (1991, hlm.51) salah satu peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri.

Definisi Pembelajaran Sejarah Istilah *history* (sejarah) diambil dari kata *historia* dalam bahasa Yunani yang berarti “informasi” atau “penelitian” yang ditujukan untuk memperoleh kebenaran (Kochhar, 2008, hlm.1). Hakikatnya sejarah adalah suatu ilmu yang mengkaji peristiwa yang telah terjadi dalam lingkup ruang dan waktu sebagai penjelas untuk masa kini, karena itu bisa ditafsirkan pula bahwa pada dasarnya sejarah merupakan dialog antara peristiwa masa lampau dan perkembangan ke masa depan. Sejarah merupakan pengalaman-pengalaman masa lalu manusia, maka manusia yang hidup sezaman atau sesudahnya dapat berguru dan belajar dari pengalaman-pengalaman itu agar menjadi manusia yang bijak. Manusia harus mampu mengambil nilai-nilai pelajaran yang terkandung dalam sejarah untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dan inspirasi bagi semua tindakan yang diambilnya pada masa-masa mendatang (Sjamsuddin, 2007, hlm.285-286).

Sejarah memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia pada masa sekarang. Wasino (2007, hlm.10-14) menyebutkan bahwa paling tidak ada beberapa guna sejarah bagi manusia yang mempelajarinya, yakni edukatif (pendidikan), instruktif (memberikan pengajaran), inspiratif (memberi ilham), serta rekreatif (memberikan kesenangan). Kaitannya dengan pendidikan, sejarah memiliki fungsi edukatif atau pendidikan karena dengan

memahami sejarah berarti telah diambil satu manfaat atau hikmah dari terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sejarah adalah guru kehidupan (*historia vitae magistra*) yang bermakna bahwa sejarah ini memiliki fungsi pendidikan, yang mengajarkan bagaimana manusia seharusnya itu bertindak dengan melihat peristiwa yang telah terjadi untuk kemudian diambil hikmahnya.

Untuk lebih memperjelas tujuan yang hendak dicapai dalam sistem pendidikan nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Di dalam PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan pengajaran sejarah dilaksanakan secara terpadu dalam mata pelajaran IPS, jadi tidak berdiri sendiri-sendiri.

Mata pelajaran sejarah memiliki fungsi-fungsi tertentu. Pada kurikulum tahun 2004, pengertian mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dan masa lampau hingga masa kini. Pengajaran sejarah di sekolah bertujuan agar siswa memperoleh kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah (Isjoni, 2007, hlm.71).

Pembelajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, memahami, dan menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, masa kini, dan masa depan di tengah-tengah perubahan dunia (Depdiknas, 2003, hlm.6).

Melalui pembelajaran sejarah siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa di

Kronologi

Jurnal Mahasiswa Ilmu Sejarah dan Pendidikan
ISSN 1411-1764 Vol. 1 No. 1 Tahun 2019

tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. Pengajaran sejarah juga bertujuan agar siswa menyadari adanya keragaman pengalaman hidup pada masing-masing masyarakat dan adanya cara pandang yang berbeda terhadap masa lampau untuk memahami masa kini dan membangun pengetahuan serta pemahaman untuk menghadapi masa yang akan datang (Isjoni, 2007, hlm.72).

Sejarawan ada yang berpendapat bahwa sejarah merupakan bagian dari pendidikan moral. Sejarah mengandung nilai-nilai yang dapat membuat masyarakat menjadi bijaksana. Bacon pernah berkata, “kalau puisi membuat orang berpikir tajam, maka matematika menjadikan cermat, filsafat memperdalam pemahaman tentang keberadaan diri dalam lingkungan, moral menjadi dasar perilaku, logika dan retorika membuat orang berfikir kritis, maka sejarah membuat orang menjadi lebih bijaksana (Kochhar, 2008, hlm.55).

Lebih terperinci lagi Kochhar (2008, hlm.56-63) menjelaskan tentang nilai-nilai sejarah yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin belajar dari sejarah, dalam hal ini terutama siswa sekolah atau peserta didik. Nilai-nilai tersebut adalah nilai keilmuan, nilai informatif, nilai pendidikan, nilai etika, nilai budaya, nilai politik, nilai nasionalisme, nilai internasional.

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan mengacu pada pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau sehingga dalam diri peserta didik terwujud satu kesadaran sejarah. Pembelajaran sejarah juga merupakan usaha memberikan pemahaman kepada peserta didik terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi untuk dipelajari sebagai upaya pembentukan karakter bangsa, karena itu pembelajaran sejarah menjadi penting dalam satu kesatuan sistem pendidikan.

III. Penguatan Nilai Multikulturalisme dan Persatuan Bangsa dalam Pembelajaran Sejarah

Dalam menguatkan kembali rasa persatuan dan kesatuan bangsa di era sekarang, perlunya kembali melaksanakan pembelajaran yang mengedepankan karakter toleransi, menghargai perbedaan baik ide maupun pendapat, kemudian menghormati segala keputusan. Sehingga dalam menyikapi suatu perbedaan dapat diselesaikan tanpa adanya konflik. Hal ini dapat dituangkan melalui pendidikan multikulturalisme dan persatuan di dalam kelas. Model

pendidikan multikulturalisme menurut Skeel (dalam Ibrahim, 2013, hlm.144-145) memiliki tujuan yaitu untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.

Melihat dari tujuan dari pendidikan multikulturalisme, dalam hal menguatkan kembali nilai multikulturalisme dapat dituangkan dalam pembelajaran sejarah baik secara konten materi maupun pelaksanaannya didalam kelas. Secara konten materi guru dapat memilih beberapa materi-materi sejarah seperti materi Masa Pergerakan Nasional sampai Sumpah Pemuda yang diajarkan di kelas XI Semester 2 dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia SMA, di kelas X semester 1 dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia SMK. Materi Pergerakan Nasional sampai Sumpah Pemuda ini cukup representatif dijadikan sebagai materi yang dapat menguatkannya kembali nilai multikulturalisme dan persatuan bangsa karena dilatarbelakangi oleh munculnya organisasi Pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, *Indische Partij*. Kemudian munculnya organisasi radikal seperti Perhimpunan Indonesia, ISDV, PNI, Partindo dan Gerindo. Perkumpulan kedaerahan seperti Pasundan, Pakempelan Kawulo Ngayogyakarta, Pakempelan Kawulo Surokarto, Pakempelan Kawulo Pakualaman, Pakempelan Kawulo Mangkunegaraan, Perkumpulan Sulawesi. Pergerakan Wanita seperti Istri Sedar, Istri Indonesia, Putri Budi Sejati. Kemudian Pergerakan Pemuda seperti Jong Java, Jong Sumantranen Bond, Jong Islamien Bond. (Poesponegoro dan Notosusanto, 2011; Pringgodigdo, 1986). Munculnya organisasi pergerakan di berbagai daerah ini dapat menunjukkan keberagaman Indonesia sehingga setiap organisasi tersebut memiliki ciri khas dan perbedaan masing-masing namun memiliki satu tujuan yang sama yaitu merdeka yang salah satunya diwujudkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Materi Masa Pergerakan Nasional dan Sumpah Pemuda ini dapat guru terapkan dalam pembelajaran sejarah menggunakan metode diskusi kelompok dengan melihat aspek-aspek karakter siswa seperti kerja sama dalam mencari informasi, mengemukakan pendapat dengan santun dan menghargai perbedaan pendapat. Guru dapat melakukan perencanaan pengajaran dengan matang agar esensi dari nilai multikulturalisme dan persatuan bangsa dalam

Kronologi

Jurnal Mahasiswa Ilmu Sejarah dan Pendidikan
ISSN 1411-1764 Vol. 1 No. 1 Tahun 2019

pembelajaran sejarah dapat terwujud. Pada proses pembelajaran siswa akan mengemukakan pendapat mengenai satu materi yang dapat memunculkan perdebatan, mengingat latar belakang siswa yang berbeda-beda dapat memunculkan konflik. Peran guru dalam penguatan nilai multikulturalisme dan persatuan bangsa ini dengan menengahi perdebatan pendapat sehingga siswa dapat menghargai perbedaan.

Maka pembelajaran di dalam kelas ini tidak hanya dituntut untuk menguatkan kecerdasan kognitif saja dengan mengetahui fakta-fakta materi, namun kecerdasan afektif pun diperlukan mengingat bangsa Indonesia dibangun atas keberagaman seperti semboyan *bhinneka tunggal ika* sehingga nilai toleransi, persatuan bangsa, multi budaya ini tidak menimbulkan konflik dan terciptanya keharmonisan antar sesama masyarakat Indonesia (Pernantah, 2016).

IV. Penutup

Penguatan Nilai Multikultural dan Persatuan Bangsa ditengah konflik masyarakat Indonesia yang memanas ini memang diperlukan untuk meminimalisir berjatuh korban sesama bangsa Indonesia dengan cara saling menghargai dalam perbedaan pendapat, bekerja sama dengan satu tujuan yang sama. Melalui pembelajaran sejarah dengan mengambil salah satu materi pergerakan nasional dapat mengajarkan kita bahwa perbedaan dalam berorganisasi, perbedaan dalam perkumpulan yang bersifat kedaerahan. Jika memiliki satu tujuan yang sama, tidak akan terjadi konflik. Seperti semboyan negara Indonesia yaitu *bhinneka tunggal ika* yang memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua.

Daftar Pustaka

- Darmodiharjo, Darji. (1991). *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional
- Depdiknas. (2003). *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)*. Jakarta : Depdiknas.
- Ibrahim, Rustam. (2013). Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Addin*. 7(1). Hlm 129-154.
- Isjoni. (2007). *Pembelajaran Sejarah Pada Satuan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Kochhar, S.K. (2008). *Pembelajaran Sejarah: Teaching of History*. Terjemahan Oleh Purwanta Dan Yovita Hardiwati. Jakarta: PT. Grasindo.

- Pernantah, Piki Setri. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Pembelajaran Sejarah di Sekolah. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia*. Yogyakarta,
- Poesponegoro, Maryati. dan Notosusanto, Nugroho. (2011). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poespowardojo, Soerjanto.1991. Pancasila Sebagai Ideology Ditinjau Dari Segi Pandangan Hisup Bersama, dalam Alfian & Oetojo Oesman, eds. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta : BP-7 Pusat.
- Pringgodigdo, A.K. (1986). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Rufaida, Hasna. (2017). Menumbuhkan Sikap Multikultural Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural Dalam Pembelajaran Ips. *Sosio Didaktika*. 4(1). Hlm 17-24.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. (2006). *Reposisi Pandangan mengenai Pancasila: Dari Pluralisme ke Multikulturalisme . Dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press
- Sapendi. (Tanpa Tahun). Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* Tersedia di <https://jurnaliainpontianak./172/135> Diakses 20 Oktober 2018
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suparlan, Parsudi, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural,” *Makalah*. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo
- Wasino. (2007). *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*. Semarang: UNNES Press.
- Yaqin, M. Ainul. (2005). *Pendidikan Multikultural: Cross-Kultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.